



ORKESTRA PHILADELPHIA DAN SIMFONI SUZHOU TAMPIL BERSAMA

Orkestra Philadelphia dan Simfoni Suzhou tampil bersama dalam sebuah konser pada Kamis (16/11) di Suzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok.

PBB Sesalkan Penolakan Israel Atas Resolusi Jeda Kemanusiaan di Gaza

Resolusi rancangan Malta itu didukung 12 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

NEW YORK (IM) – PBB menyesalkan penolakan Israel atas resolusi jeda kemanusiaan di Jalur Gaza yang berhasil diadopsi Dewan Keamanan (DK) PBB. Meski resolusi DK PBB bersifat mengikat, Israel masih belum menghentikan pertempuran di Gaza dan masih membatasi secara ketat suplai bantuan kemanusiaan yang bisa memasuki wilayah tersebut. “Kami menyesali pernyataan yang kami lihat dari Pemerintah Israel mengenai resolusi (jeda kemanusiaan oleh DK PBB) tersebut. Maksud saya, seperti yang kita semua tahu, cukup me-

nyiksa bagi Dewan untuk bisa sampai meloloskan resolusi,” kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam pengarahannya pers, Jumat (17/11), dikutip Anadolu Agency.

Pada kesempatan itu, Dujarric ditanya apakah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menganggap resolusi jeda kemanusiaan yang diadopsi oleh DK cukup.

“Saya pikir adalah baik jika DK menemukan cara untuk bergerak bersama menuju penghentian kekerasan dalam konflik ini. Pertempuran masih terus berlanjut. Tentu saja masih banyak yang harus di-

lakukan,” ujar Dujarric merespons pertanyaan tersebut.

Setelah menghadapi empat kali kegagalan, Dewan Keamanan PBB akhirnya berhasil mengadopsi resolusi jeda kemanusiaan di Gaza pada Rabu (15/11) lalu. Resolusi rancangan Malta itu didukung 12 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan. Tiga negara, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Rusia memilih abstain.

Resolusi itu menyerukan pentingnya memperpanjang jeda dan koridor kemanusiaan di Gaza selama “jumlah hari yang cukup”.

Hal itu guna memungkinkan akses penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi badan-badan serta para mitra PBB dalam menyalurkan bantuan. Resolusi turut menekankan perlunya memastikan bahan bakar diizinkan memasuki Gaza.

Resolusi juga meminta semua pihak tidak merampas layanan dasar dan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil di Gaza. Selain itu, resolusi turut menyerukan evakuasi orang-orang yang sakit dan terluka di Gaza, khususnya anak-anak.

Meski resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat, namun Israel menolaknya. Tel Aviv telah mengisyaratkan enggan mematuhi resolusi jeda kemanusiaan di Gaza yang sudah disahkan Dewan Keamanan.

“Tidak ada tempat untuk jeda kemanusiaan yang berkepanjangan (di Gaza),” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Israel dalam sebuah pernyataan, dikutip surat kabar Israel, Haaretz, Rabu lalu.

Israel enggan menerima jeda kemanusiaan panjang di Gaza selama Hamas belum membebaskan para sandera. Ketika melakukan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas diduga menculik lebih dari 200 orang yang terdiri dari warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga mengkritik keras diadopsinya resolusi jeda kemanusiaan oleh Dewan Keamanan. Menurutnya resolusi itu tidak sesuai kenyataan karena di dalamnya tidak turut menuntut serangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Agresi Israel ke Gaza telah membunuh sedikitnya 11.630 warga Gaza. Mereka termasuk 4.710 anak-anak dan 3.165 perempuan. Sementara korban luka sudah mendekati 30 ribu orang. ● tom

Netanyahu Akui Israel Gagal Minimalkan Korban Sipil

TEL AVIV (IM) – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengemukakan negaranya berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan warga sipil dari bahaya, saat perang melawan Hamas berkecamuk di Jalur Gaza. Namun, dia mengakui kegagalan upaya-upaya untuk meminimalkan korban jiwa warga sipil di Jalur Gaza.

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (17/11), Netanyahu menyampaikan pernyataan itu saat ditanya oleh media televisi AS CBS News soal apakah kematian ribuan warga Palestina di Jalur Gaza akibat pengeboman Israel, sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, akan memicu kebencian generasi baru.

“Setiap kematian warga sipil adalah tragedi. Dan kami seharusnya tidak mendapati hal tersebut, karena kami melakukan semuanya yang kami bisa untuk menjauhkan warga sipil dari bahaya, sementara Hamas membahayakan mereka,” ucap Netanyahu menjawab pertanyaan CBS News.

“Jadi kami mengirim selebaran, menelepon mereka lewat ponsel, dan kami mengatakan, ‘Pergi’. Dan banyak yang telah pergi,” sebutnya.

Israel telah menyatakan bahwa tujuan dari operasi militernya di Jalur Gaza adalah menghancurkan Hamas. Operasi militer itu, sebut Netanyahu, disertai upaya meminimalkan korban sipil. Namun menurutnya, upaya tersebut gagal.

“Hal lainnya yang bisa saya katakan adalah

kami akan berusaha menyelesaikan pekerjaan ini dengan korban sipil yang minimal. Itulah yang berusaha kami lakukan yaitu meminimalkan korban sipil. Namun sayangnya, kami tidak berhasil,” ujar Netanyahu mengakhiri.

Warga sipil Palestina menanggung beban paling berat akibat operasi militer Israel selama berminggu-minggu, untuk merespons serangan Hamas pada awal Oktober lalu yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang. Hamas juga disebut menyandera lebih dari 240 orang lainnya, termasuk warga negara asing.

Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 11.500 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel selama lebih dari sebuah tahun terakhir. Jumlah korban tewas itu mencakup lebih dari 4.700 anak-anak.

Dua pertiga dari total 2,3 juta penduduk Jalur Gaza kehilangan tempat tinggal akibat perang.

Pada Kamis (16/11) waktu setempat, Angkatan Udara Israel menyebarkan selebaran terbaru di beberapa bagian selatan Jalur Gaza, yang isinya mengimbau masyarakat untuk mengungsi demi keselamatan mereka. Israel sebelumnya juga menggunakan selebaran di Jalur Gaza bagian utara untuk memperingatkan warga sipil agar mengungsi.

Ratusan ribu orang mematuhi peringatan Israel itu, yang memicu ekodus massal yang dikhawatirkan oleh banyak warga Palestina akan menjadi permanen. ● tom

Afsel Minta Pengadilan Kriminal Internasional Selidiki Israel Atas Tuduhan Kejahatan Perang

DOHA (IM) – Afrika Selatan telah meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki pemerintah Israel atas dugaan kejahatan perang di Gaza, Presiden Cyril Ramaphosa mengumumkan pada Rabu, (15/11) selama kunjungan dua hari ke Qatar.

Menurut Ramaphosa, klaim terhadap Israel, yang belum meratifikasi Statuta Roma – perjanjian yang membentuk ICC – diajukan “bersama dengan banyak negara lain”.

Pekan lalu, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan Bogota akan meminta pengadilan mengadili Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas “pembantaian” warga sipil di Gaza.

Demikian pula, dua pengacara Turki dan seorang mantan anggota parlemen

telah mengajukan petisi kepada pemerintah Ankara untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel di ICC, dan Turki juga bukan salah satu pihak di dalamnya.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas bulan lalu menyusul serangan kelompok militan Palestina ke wilayah Israel yang menewaskan sekira 1.200 orang.

Pembalasan yang diakibatkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyebabkan Gaza dibombardir selama lebih dari sebulan.

Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah mengatakan lebih dari 11.200 orang telah tewas di wilayah kantong tersebut sejak konflik meletus, dan 2.700 lainnya dilaporkan hilang.

Pada Rabu, Ramaphosa mengklaim bahwa meski-

pun Afrika Selatan, pendukung aktif kedaulatan Palestina, namun juga tidak mendukung serangan Hamas.

Human Rights Watch (HRW) pada Selasa, (14/11) juga menuntut agar serangan Israel terhadap rumah sakit, ambulans, dan personel medis di Gaza “diselidiki sebagai kejahatan perang”.

Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa 521 orang, termasuk 16 pekerja medis, telah tewas dalam 137 “serangan terhadap layanan kesehatan” di Gaza pada 12 November.

Awal bulan ini, Afrika Selatan bergabung dengan Chad, Yordania, Bahrain, Honduras, Kolombia, Bolivia, dan Turki dalam menarik diplomat dari Tel Aviv sebagai tanggapan atas tindakan Israel di Gaza. ● ans



AGROBUSINESS MEDAFRICA 2023 DIADAKAN DI TUNISIA

Seorang staf menyiapkan sampel makanan selama pameran industri makanan di Hammamet, Tunisia, Kamis (16/11). Pameran yang merupakan pameran industri makanan internasional untuk kawasan Mediterania Afrika ini berlangsung hingga Sabtu (18/11).

Puluhan Tentara Myanmar Melarikan Diri ke India

NEW DELHI (IM) – Setidaknya 29 tentara Myanmar memasuki India pada Kamis, (16/11) untuk menghindari serangan pemberontak di pangkalan militer dekat perbatasan India. Ini terjadi ketika pemberontak meningkatkan serangan mereka terhadap junta yang berkuasa.

Awal pekan ini, 43 tentara Myanmar memasuki negara bagian Mizoram di India setelah pangkalan militer mereka dikuasai oleh pemberontak. Hampir 40 orang dipulangkan oleh pihak berwenang India melalui titik penyeberangan perbatasan yang berbeda, beberapa ratus km sebelah timur.

Militer Myanmar telah memerangi etnis minoritas dan pemberontakan lainnya selama beberapa dekade, tetapi kudeta pada tahun 2021 telah menghasilkan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kekuatan anti-militer yang menjadi tantangan terbesar bagi tentara selama bertahun-tahun.

Penguasa militer di negara tersebut telah memerintahkan semua staf pemerintah dan mereka yang memiliki pengalaman militer untuk bersiap bertugas jika terjadi keadaan darurat. “Jika perlu, unit semacam itu mungkin diperlukan untuk keluar dan bertugas dalam bencana alam, dan keamanan,” kata dewan junta dalam sebuah perintah sebagaimana dilansir Reuters.

Tin Maung Swe membenarkan perintah tersebut sambil menekankan bahwa situasi di ibu kota, di Myanmar tengah, dalam keadaan tenang. Pemerintahan paralel yang dibentuk oleh politisi pro-demokrasi untuk menentang militer, dan bersekutu dengan beberapa faksi pemberontak, telah meluncurkan kampanye “Jalan Menuju Nayspyitaw” yang dikatakan bertujuan untuk mengambil kendali ibu kota.

Juru Bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan pada Rabu, (15/11) malam bahwa militer menghadapi “serangan hebat dari sejumlah besar tentara pemberontak bersenjata” di Negara Bagian Shan di timur laut, Negara Bagian Kayah di timur dan Negara Bagian Rakhine di barat.

Zaw Min Tun mengatakan beberapa posisi militer telah dievakuasi dan pemberontak telah menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di pos-pos militer. “Kami segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari serangan bom drone secara efektif,” kata juru bicara junta.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi tentatif.

Militer memerintah Myanmar dengan tangan besi selama 50 tahun setelah merebut kekuasaan pada tahun 1962, dan bersikeras bahwa mereka adalah satu-satunya institusi yang mampu menyatukan negara yang beragam ini.

Kudeta tahun 2021 menghancurkan harapan akan reformasi dan memicu gelombang besar oposisi yang menyatukan aktivis pro-demokrasi di kota-kota dengan kekuatan etnis minoritas yang berjuang untuk menentukan nasib sendiri di daerah pedalaman. Bentrokan telah mengimpor pengungsi ke seluruh negara tetangga Myanmar, termasuk ribuan orang yang melarikan diri ke India dalam beberapa hari terakhir dari pertempuran di Negara Bagian Chin di barat laut.

Lalmalsawma Hnamte, seorang pejabat polisi negara bagian di distrik Vamphai di Mizoram, tempat 29 tentara Myanmar terakhir memasuki India dari pangkalan militer Tuibal di negara bagian Chin, mengatakan tentara tersebut diserahkan kepada pasukan paramiliter federal yang menjaga perbatasan.

Anindam Bagchi, juru bicara Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada Kamis bahwa New Delhi “sangat prihatin” dengan situasi di sepanjang perbatasan. Dia mengemukakan kembali posisi New Delhi, meminta penghentian kekerasan dan penyelesaian situasi melalui dialog.

Pemerintah Barat telah menerapkan kembali sanksi terhadap junta Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap protes dan menuntut pembebasan Suu Kyi serta politisi dan aktivis pro-demokrasi lainnya. ● gul

Menkeu Israel Tolak Negosiasi dengan Hamas dan Qatar untuk Pembebasan Sandera di Gaza

YERUSALEM (IM) – Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan, Israel tidak menuju ke arah yang benar dalam perang melawan Hamas saat ini. Dalam tulisan di platform media sosial, X, menteri sayap kanan itu menyerukan agar Israel berhenti bernegosiasi mengenai pembebasan sandera oleh pihak Hamas.

“Fakta bahwa setelah 41 hari, (Ketua Hamas Yahya) Sinwar masih dapat melakukan negosiasi untuk menetapkan syarat pembebasan para sandera menunjukkan bahwa kita tidak berada di arah yang benar,” ujar Smotrich, dilaporkan Times of .

Saat kabinet perang mengadakan pertemuan di Tel Aviv, Smotrich mengatakan bahwa sudah saatnya kabinet perang menunjukkan kekuatan dengan memutus negosiasi dengan Hamas dan Qatar sebagai mediator.

Menurut Smotrich, sudah saatnya Israel menetapkan persyaratan khusus untuk membebaskan sandera.

“Untuk beberapa waktu sekarang, kita seharusnya menjadi pihak yang menolak untuk melakukan negosiasi, dan hanya berbicara dengan tembakan dan ledakan, itulah satu-satunya cara untuk membawa kembali semua sandera dan memulihkan keamanan bagi Negara Israel,” ujar Smotrich.

Sebelumnya juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah mengatakan, Israel menolak gencatan senjata untuk pembebasan para tawanan di Gaza. Abu Ubaidah menambahkan, penolakan Israel tersebut tidak hanya membahayakan nyawa rakyat Palestina namun juga para sandera.

Abu Ubaidah mengatakan, pekan lalu ada upaya yang dilakukan oleh mediator Qatar untuk menjamin pembebasan sandera Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan imbalan pembebasan 200 anak-anak Pal-

estina dan 75 perempuan Palestina, yang mewakili jumlah total tahanan perempuan dan anak-anak yang ditahan oleh Israel pada 11 November. Israel meminta pembebasan seratus perempuan dan anak-anak yang disandera di Gaza.

Abu Ubaidah mengatakan, Hamas menetapkan syarat pembebasan sandera dengan gencatan senjata selama lima hari, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Abu Ubaidah menjelaskan, Hamas dapat membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang ditahan di Gaza dan pada akhirnya sandera yang dibebaskan dapat mencapai 70 orang, karena rumahnya penahanan para sandera oleh berbagai faksi.

“Namun, musuh terus menunda-nunda dan menghindari pemenuhan kewajiban ini, tidak hanya mengabaikan nyawa warga sipil Palestina tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap pembunuhan para sandera,” ujar Abu Ubaidah dalam pidato terbaru pada Senin (13/11) yang dirilis oleh Resistance News Network di Telegram.

Abu Ubaidah menjelaskan, contoh yang paling jelas adalah pembunuhan terhadap tentara Israel yang ditangkap, Faouf Assyani. Tentara tersebut ditangkap hidup-hidup dan mencatat permohonan pembebasannya pada awal perang.

Abu Ubaidah mengatakan, 38 hari setelah dimulainya Pertempuran Badai Al-Aqsa, pejuang Palestina terus menggempur pasukan Israel dan kendaraan mereka, yang menyusup ke Kota Gaza dan Beit Hanoun dari beberapa arah.

Dalam 48 jam terakhir, pejuang Palestina telah menghancurkan seluruh atau sebagian 20 kendaraan militer, termasuk tank dan kendaraan lapis baja, di area infiltrasi pasukan musuh. ● tom